



LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT NELAYAN  
TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT  
KABUPATEN DATI II BATANG

Oleh :

UNTUNG DWI HANANTO,SH  
DAN TIM PENELITIAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1998

---

Dibiayai Oleh Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro, sesuai Perjanjian Pelaksanaan Penelitian tanggal 4 Agustus 1997 Nomer : 3157/PT09.H2/N/1997.

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	
I. PENDAHULUAN.....	1
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	10
IV. METODE PENELITIAN.....	12
V. HASIL DAN PEMBAHSAN.....	15
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN	

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. a. Judul : Pengaruh Lingkungan Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Kabupaten Daerah Tingkat II Batang.  
b. Bidang Ilmu : Hukum.  
c. Kategori : Tingkat Dasar.
2. Pengusul / Ketua Peneliti :  
a. Nama : Untung Dwi Hananto, SH  
b. Jenis Kelamin : Laki-Laki  
c. NIP/Gol/Pangkat : 131 763 897/IIIB/ Penata Muda TK I  
d. Jabatan : Asisten Ahli  
e. Fakultas : Hukum.  
f. Universitas : Diponegoro.
3. Susunan Tim Peneliti  
a. Pembimbing Peneliti :  
b. Anggota : 3 orang.
4. Lokasi Peneliti : Kabupaten Dati II Batang.  
5. Jangka waktu penelitian : 6 Bulan.  
6. Biaya Penelitian : Rp. 2.970.000,00  
7. Sumber Biaya : Dana DIK Rutin UNDIP

Semarang,

Februari 1998

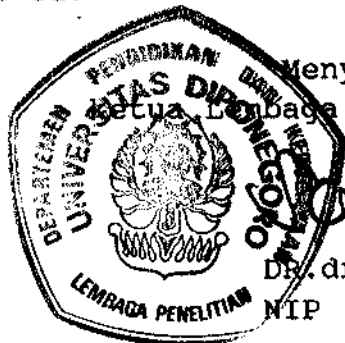


Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

Prof. Barda Nawawi Arief, SH  
NIP. 130 350 519

Ketua Peneliti

Untung Dwi Hananto, SH  
NIP. 131 763 897



Menyetujui  
Ketua Lembaga Penelitian UNDIP

Dr. dr Satoto  
NIP :

## RINGKASAN DAN SUMMARY

Lingkungan sosial budaya masyarakat nelayan ada pengaruhnya terhadap pengelolaan sumber daya perikanan laut, seperti upacara adat dan sedekah laut sehingga hal tersebut menurut masyarakat perlu dipertahankan.

Faktor-faktor sosial budaya masyarakat nelayan yang berpengaruh terhadap pelestarian kemampuan sumber daya perikanan laut antara lain adalah sikap menyatu dengan alam atau pasrah, hal ini menyebabkan perkembangan sumber daya perikanan seimbang dengan pemanfaatan perikanan oleh neklayan yang sebagian besar masih menggunakan alat tangkap tradisional sedangkan apabila menggunakan alat tangkap modern dan sikap ingin memanfaatkan sumber daya perikanan semaksimal mungkin, hal ini mungkin akan menurunkan kemampuan sumber daya perikanan yang ada.

Tindakan atau kebijakan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan oleh nelayandan petani kecil guna meningkatkan taraf hidup mereka tanpa merusak kemampuan dan kelestarian sumber daya perikanan dan sumber daya alam lainnya di wilayah pantai adalah melalui izin usaha perikanan yang diberikan kepada para pengusaha.

Langkah operasional Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas sumber daya manusia dan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup serta pemahaman nelayan dalam bidang usahanya adalah dilakukan dengan penyuluhan-penyuluhan melalui tenaga lapangan yang ada (PPL Perikanan).

Di samping hal tersebut juga para nelayan disarankan untuk masuk menjadi anggota Koperasi Unit Desa Perikanan. Keuntungannya adalah demi kelancaran pemasaran dan stabilnya harga serta yang tak kalah pentingnya adalah para nelayan dapat menikmati SHU (sisa hasil usaha) dalam bentuk uang yaitu pada masanelayan dalam keadaan Paceklik.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmatnya dan petunjuknya, dapat diselesaikan laporan akhir penelitian yang berjudul:

" Pengaruh Lingkungan Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Di Kabupaten Dati II Batang ".

Penelitian ini dilakukan atas biaya Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro sesuai perjanjian pelaksanaan penelitian tanggal 4 Agustus 1997 No 3157/PT09.H2/N/1997.

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang budaya masyarakat nelayan dewasa ini dalam rangka peningkatan pendapatan dan kualitas sumber daya manusia masyarakat nelayan dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

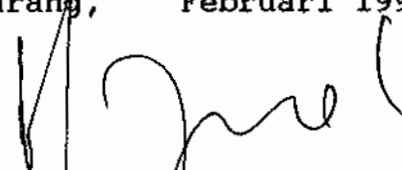
Kepada Pemerintah Daerah TK I Batang tidak lupa disampaikan banyak terima kasih yang setinggi tingginya atas perkenan dan izinnya untuk melaksanakan penelitian ini.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian UNDIP yang telah mempercayai kami untuk melakukan penelitian ini.

Kepada Dekan Fakultas Hukum UNDIP, Ketua Jurusan HTN, Rekan-rekan Anggota penelitian juga diucapkan terima kasih yang telah banyak membantu dalam tersusunnya laporan ini.

Harapan kami mudah mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama Pemerintah Daerah TK II Batang dan para pejabat yang berkaitan dengan nelayan dan perikanan serta Dunia Pendidikan.

Semarang, Februari 1998

  
Untung Dwi Hananto, SH

NIP. 131 763 897

**PENGARUH LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT NELAYAN  
TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT  
DI KABUPATEN DATI II BATANG**

**B A B I  
PENDAHULUAN.**

**A. LATAR BELAKANG.**

Pembangunan pada hakekatnya adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Hal ini berarti pembangunan mencakup kemajuan lahiriah seperti, pangan, sandang, papan atau perumahan dan kemajuan batiniah seperti, pendidikan, rasa aman, rasa keadilan dan sebagainya.

Pada masa pembangunan dewasa ini masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup mendapat perhatian yang serius. Masalah ledakan penduduk, meningkatnya jumlah kaum miskin di kota besar akibat urbanisasi, pembangunan industri yang tidak memperhatikan lingkungan perlu segera mendapat pemecahan.

Di dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.4 tahun 1982 (LNRI No.12 tahun 1982, TLN RI No.3215 tahun 1982) tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan :

" Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya".

Selain hal tersebut, dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 5 UU no.4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan diberikan batasan mengenai unsur Lingkungan Hidup yang berupa sumber daya , yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati, dan Sumber Daya Binaan. Dengan demikian sesuai dengan Penjelasan UU No.4 tahun 1982, Lingkungan Hidup di sini merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Sehubungan dengan hal itu, maka kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan peningkatan taraf hidup manusia dengan jalan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang tersedia di sekitar lingkungan hidupnya. Karena itu pembangunan pada hakekatnya merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan hidupnya dalam upaya memanfaatkan Sumber Daya Alam bagi kepentingannya.

Salah satu sumber Daya Alam hayati yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia adalah sumber daya perikanan laut. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan agar pemanfaatan sumber daya perikanan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh warga negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, dan harus dapat dinikmati secara merata,

baik oleh produsen maupun konsumen. Pemerataan pemanfaatan sumber daya perikanan hendaknya juga terwujud dalam perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti nelayan dan petani ikan kecil agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan usahanya perlu didorong ke arah kerjasama dalam wadah koperasi. Di samping itu diharapkan pula adanya kerjasama antara perusahaan perikanan yang kuat dengan nelayan/petani ikan kecil dengan dasar saling menguntungkan, misalnya dalam bentuk Perusahaan Inti Rakyat (PIR).

Walupun sumber daya perikanan khususnya sumber daya perikanan laut dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya perikanan laut tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya. Ini berarti bahwa pengusahaan sumber daya perikanan laut harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari. Dengan kata lain pemanfaatan sumber daya perikanan laut harus dilakukan secara rasional. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perijinan. Penerapan perijinan tersebut ditujukan bagi perusahaan perikanan, sedangkan bagi nelayan dan petani ikan kecil dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki ijin. Akan tetapi untuk keperluan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan laut tetap diperlukan pencatatan terhadap usahanya.



Perijinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan laut juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha perikanan.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bidang Ekonomi nomor 1 tentang Pertanian huruf a. disebutkan bahwa :

" Pembangunan pertanian yang mencakup ....., perikanan, ....., diarahkan pada perkembangan pertanian maju, efisien dan tangguh. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup..... nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor. Untuk itu perlu dilanjutkan dan ditingkatkan usaha-usaha diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi serta rehabilitasi yang harus dilaksanakan secara terpadu, serasi dan merata disesuaikan dengan kondisi tanah, air dan iklim, dengan tetap memelihara kelestarian kemampuan sumber alam dan lingkungan hidup serta memperhatikan pola kehidupan masyarakat setempat. Dalam rangka pembangunan pertanian perlu ditingkatkan pula kemampuan pengusahaan dan pengelolaan serta penerapan teknologi yang tepat pada usaha-usaha pertanian."

Sedangkan dalam huruf d. disebutkan bahwa :

" ..... Perhatian khusus perlu diberikan kepada usaha perlindungan dan pengembangan perikanan rakyat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan serta memajukan desa-desa pantai....."

Karenanya suatu kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pengelolaan perikanan, baik yang bersifat nasional maupun lokal mencakup suatu tindakan pemerintah yang berwenang, sebagaimana tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Bab III tentang Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, huruf B tentang

Arah Pembangunan Jangka Panjang :

(1) " Pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruhnya Masyarakat Indonesia.

Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya, atau kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggungjawab, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya.....".

Dalam hal ini kriteria dari tindakan pemerintah tersebut ialah :

Pertama, merupakan tindakan yang disengaja (*deliberate*). Suatu tindakan yang dengan sengaja diambil untuk membentuk suatu tindakan dimasa depan. Ini mencakup suatu sikap untuk meninggalkan pola-pola yang sudah ada dan keberanian untuk mencoba cara-cara baru.

Kedua, tindakan tersebut didasarkan atas suatu perencanaan, sehingga suatu perubahan yang diinginkan dimasa depan dapat diramalkan dengan tepat.

Ketiga, diperlukan suatu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tindakan tersebut.

Salah satu kebijaksanaan pemerintah dibidang perikanan adalah mengatasi masalah pengaruh lingkungan sosial budaya masyarakat nelayan terhadap pengelolaan sumber daya perikanan laut di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Dati II Batang pada khususnya.

Lingkungan sosial budaya masyarakat nelayan yang berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya perikanan laut di pantai utara Jawa Tengah salah satunya adalah tradisi "Labuhan". Tradisi ini dilakukan dengan cara membuang ke laut sesaji agar dalam mencari ikan selamat dan mendapat ikan banyak.

Tradisi ini dalam masa pembangunan yang berwawasan lingkungan apakah masih perlu dipertahankan ataukah tidak ? Hal ini memerlukan suatu kajian yang mendalam sehingga tidak akan menimbulkan dampak negatif pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan laut yang berwawasan lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut di tingkat nasional maupun di tingkat lokal/daerah, keserasian kebijaksanaan pembangunan akhirnya memerlukan pelembagaan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini di tingkat nasional tercakup dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan (LN RI Tahun 1985 Nomor 46, TLN nomor 3299).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Betulkah Lingkungan Sosial Budaya Masyarakat Nelayan berpengaruh terhadap Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Kabupaten Dati II Batang.
2. Faktor-faktor sosial budaya apa sajakah dari masyarakat nelayan yang berpengaruh terhadap pelestarian kemampuan sumber daya perikanan laut di Kabupaten Dati II Batang.

3. Untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan petani ikan kecil tanpa merusak kemampuan dan kelestarian sumber daya perikanan dan sumber daya alam lainnya di wilayah pantai tindakan atau kebijaksanaan apakah yang dibutuhkan oleh mereka ?
4. Langkah-langkah apakah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesadaran lingkungan nelayan dan petani ikan kecil ?
5. Bagaimanakah tata laksana pencatatan terhadap usaha nelayan dan petani ikan kecil ?
6. Bagaimanakah pola pembinaan yang dilakukan aparat Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada perusahaan perikanan, nelayan dan petani ikan kecil ?